



TANTANGAN PERTAHANAN DAN EKONOMI INDONESIA SERTA KEBIJAKAN YANG PERLU DILAKUKAN

Indonesian National Defense and Economic Challenges and the Policies Needed

Posma Sariguna Johnson Kennedy
posmahutasoit@gmail.com

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Indonesia

Abstract

The future challenge for Indonesia's defense is the lack of defense budgets while defense issues will become more complex. This literature review would like to see the challenges of Indonesia ahead and the recommendations given to deal with it. The very limited natural resources causing future conflicts will be greatly influenced by the motivation of controlling resources through military force. To face it, the increasing quantity and quality of defense equipment must be considered by following the technology of today. Human resource development in quantity and quality must also be continuously carried out, such as with the training, education and absorption of the latest defense technologies. In addition, it is time for Indonesia's defense industry to be empowered in meeting the needs of national defense.

1. Pendahuluan

Untuk masa yang akan datang peranan dan fungsi pertahanan akan semakin penting karena sangat erat kaitannya dengan perekonomian. Keinginan Indonesia menjadi salah satu negara yang penting dalam perekonomian dunia harus didukung dengan pertahanan yang kuat sehingga mampu mencegah gangguan-gangguan dan ancaman yang muncul terhadap bangsa.

Dalam membangun kekuatan bangsa, terdapat dua unsur fisik yang harus diperhatikan, yaitu faktor ekonomi dan pertahanan. Jika tidak memiliki ekonomi dan pertahanan yang kuat, maka pertahanan negara akan menjadi lemah. Jumlah anggaran pertahanan ditentukan oleh besar pendapatan domestik bruto (PDB) dari negara, akibatnya tingkat ekonomi menjadi faktor yang menentukan dibalik kekuatan pertahanan. Tetapi sebaliknya, dengan memiliki angkatan perang yang kuat maka niscaya dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Steiner (2003) dan Rahakundini (2007) dalam Kennedy (2016) menuliskan bahwa naik turunnya anggaran pertahanan secara umum memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, sedangkan ekonomi dan pertahanan merupakan komponen utama dalam membangun kekuatan suatu bangsa.

Penelitian ini ingin melihat tantangan pertahanan dan hubungannya dengan ekonomi Indonesia ke depan, serta rekomendasi kebijakan untuk menghadapinya. Metode penelitian yang dilakukan adalah literatur review dari berbagai bahan pustaka.

2. Tantangan Terhadap Perekonomian Nasional

Indonesia merupakan negara dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya di Asia Tenggara, sehingga menjadikannya sebagai kekuatan utama di kawasan. Di sisi lain, dengan diimplementasikannya komunitas ekonomi ASEAN dan ACFTA (*Asean-China Free Trade Area*) menuntut Indonesia meningkatkan daya saingnya untuk mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut. Indonesia perlu memposisikan dirinya sebagai basis ketahanan

pangan dunia, pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, sumber daya mineral, dan pusat mobilitas logistik global.

Sesuai MP3EI (2011), percepatan dan perluasan ekonomi Indonesia secara potensial didukung oleh potensi demografi, sumber daya alam, dan posisi geografis, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Penduduk yang besar dengan daya beli yang terus meningkat adalah pasar yang potensial. Sementara itu jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang terus membaik memberikan potensi berdaya saing. Indonesia tengah berada dalam periode transisi struktur penduduk usia produktif, sehingga indeks ketergantungan Indonesia akan mencapai angka terendah. Implikasi dari kondisi ini adalah semakin pentingnya perluasan lapangan kerja agar perekonomian dapat memanfaatkan secara maksimal besarnya porsi penduduk produktif. Bila pendidikan secara umum diasumsikan terus membaik, maka perekonomian Indonesia sesungguhnya dalam kondisi premium.
- b. Indonesia adalah negara yang kaya dengan potensi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun tidak terbarukan (hasil tambang dan mineral). Kekayaan sumber daya alam Indonesia harus dapat dikelola seoptimal mungkin, dengan meningkatkan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah tinggi dan mengurangi ekspor bahan mentah. Sampai tahun 2010, Indonesia masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditi, antara lain kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), kakao (produsen terbesar kedua di dunia), timah (produsen kedua terbesar di dunia), nikel (cadangan terbesar keempat dunia), dan bauksit (cadangan terbesar ketujuh dunia), serta komoditas unggulan lainnya seperti besi baja, tembaga, karet dan perikanan. Indonesia juga memiliki cadangan energi yang sangat besar seperti misalnya batubara, panas bumi, gas alam, dan air yang sebagian besar dimanfaatkan untuk mendukung industri andalan seperti tekstil, perkapalan peralatan transportasi dan makanan-minuman.
- c. Letak geografis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah dengan panjang mencapai 5.200 km dan lebar mencapai 1.870 km. Lokasi geografisnya juga sangat strategis (memiliki akses langsung ke pasa terbesar di dunia) karena Indonesia dilewati oleh satu Sea Lane of Communication (SLoC), yaitu Selat Malaka di mana jalur ini menempati peringkat pertama dalam jalur pelayaran kontainer global. Indonesia juga memiliki akses langsung kepada enam wilayah LME (perairan *Large Marine Ecosystem*) yaitu Benggala, Laut Cina Selatan, Sulu Celebes, Laut-laut Indonesia, Arafura – Gulf Carpentaria, Laut Australia Utara. Sehingga, peluang Indonesia untuk mengembangkan industri perikanan tangkap sangat besar.

Walaupun secara geopolitik dan geostrategi Indonesia terletak pada posisi yang strategis serta menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan, namun menghadapi potensi ancaman yang tidak ringan. Tantangan pertahanan pada tahun-tahun yang akan datang diperkirakan akan lebih kompleks. Wilayah Indonesia yang sangat luas serta karakteristik geografi sebagai negara kepulauan membutuhkan kekuatan pertahanan yang proporsional. Untuk masa ke depan merupakan hal yang tidak mudah untuk penyelenggaraan pertahanan dalam menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan cita-citanya menciptakan rasa aman dan meningkatkan kesejahteraannya.

3. Tantangan Terhadap Keamanan Nasional

Masalah utama suatu negara meningkatkan pertahanan saat ini bukan lagi untuk menghadapi agresi negara lain secara konvensional. Yang terjadi saat ini dan akan datang adalah perebutan sumber-sumber daya alam. Keamanan sumber-sumber daya alam, khususnya keamanan energi harus diwaspadai. Sumber daya energi tidak hanya terbatas tetapi juga semakin menipis dan dibutuhkan oleh semua negara sebagai modal untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Saat ini kebutuhan seluruh negara akan energi masih sangat tergantung pada minyak mentah sehingga sangat rentan menjadi pemicu awal konflik antar negara. Kenaikan harga minyak yang selalu mengancam stabilitas ekonomi, politik dan sosial makin membuktikan bahwa minyak merupakan faktor yang fundamental bagi setiap negara. Minyak merupakan faktor yang menentukan

keberlangsungan hidup negara dan masyarakatnya. Kondisi ini mendorong negara untuk selalu berusaha memperoleh jaminan akses energi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika telah terjadi proses sekuritisasi atas kebutuhan energi, misalnya minyak, maka strategi militer merupakan salah satu strategi untuk memperoleh jaminan akses energi.

Penggunaan strategi militer dalam penjaminan akses energi dan sumber daya untuk masa yang akan datang adalah keadaan yang sudah umum karena strategi keamanan energi hampir selalu berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer. Ketika strategi militer telah menjadi pilihan untuk mengamankan akses energi maka kebutuhan pengembangan persenjataan menjadi keharusan. Hal ini terlihat di wilayah sumber-sumber minyak dunia seluruhnya berada dalam situasi yang panas dan rawan konflik, seperti Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah dan sejumlah wilayah di Asia Timur. Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Rusia memanfaatkan fluktuasi harga minyak ini untuk meningkatkan belanja militernya (Purwanto, 2011).

Upaya negara-negara besar mengamankan pasokan energinya sangat mungkin menyeret Indonesia ke dalam konflik antar negara, mengingat posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah jalur laut transportasi internasional, terutama jalur laut transportasi di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur laut terpadat dunia yang menjadi urat nadi lalu lintas transportasi minyak bumi sebesar 9,5 juta barel yang menghidupi perekonomian dunia. Sejumlah kegagalan dari Indonesia, Singapura dan Malaysia menjamin keamanan perairan Selat Malaka menunjukkan sejumlah negara besar turut campur atas wilayah ini. (IDSP, 2008).

Selain sumber-sumber daya dan energi merupakan pemicu konflik yang harus diwaspadai untuk keamanan di masa yang akan datang, keinginan setiap negara untuk mengembangkan kekuatan militernya secara tidak proporsional, khususnya dalam persenjataan nuklir dan pemusnah massal juga harus tetap diperhatikan. Pengembangan konsep natural *balance of power* juga dapat memicu kekhawatiran kepada negara-negara yang lebih kuat akan menjadi polisi bagi negara yang lebih lemah. Sehingga pemaksaan kepentingan-kepentingan menjadi alasan untuk melakukan agresi, seperti Amerika Serikat terhadap Irak. Berdasarkan hal tersebut patut diwaspadai kehadiran pangkalan militer Amerika di Darwin (Australia) yang sangat dekat dengan Indonesia.

Dengan konsep *natural balance of power ini* diharapkan setiap negara menurunkan tingkat militerisasinya dan lebih memfokuskan pada peningkatan ekonomi. Akan tetapi sungguhlah tidak bijak jika keamanan Indonesia sangat tergantung terhadap kebijakan militer bangsa lain. Karena itu keamanan negara harus berdasarkan kekuatan sendiri melalui peningkatan kekuatan pertahanan.

Walaupun secara konvensional ancaman peperangan tidak mungkin terjadi pada waktu dekat, tetapi pengambilan paksa sumber-sumber daya alam menjadi masalah yang sangat serius bagi Indonesia, apalagi gangguan-gangguan keamanan yang terjadi di wilayah perbatasan. Kerugian potensial dan riil selama ini dapat saja lebih besar dibandingkan membangun pertahanan yang kuat untuk menjaga wilayah laut, udara dan daratan Indonesia. Salah satu sebab mengapa Indonesia tidak dapat mengatasi keamanan ini karena keterbatasan dana yang menyebabkan operasi untuk menjaga semua perairan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang sama.

4. Tantangan Terhadap Anggaran Pertahanan

Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Selama ini penentuan jumlah anggaran pertahanan banyak didasarkan pada faktor kemampuan keuangan negara dan prioritas pembangunan. Menurut Undang-undang TNI pasal 25 UU no.3/2002 mengatur bahwa anggaran pertahanan berasal dari APBN dan digunakan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan Tentara Nasional Indonesia serta komponen pertahanan lainnya.

Penyediaan anggaran militer oleh negara dianggap tidak mencukupi kebutuhan dalam pengadaan alat utama persenjataan (alutsista). Apabila diukur dari nilai Pendapatan Domestik Bruto (PDB), rata-rata anggaran pertahanan dalam beberapa dekade terakhir relatif konstan, masih pada kisaran 1%. Pengalokasian anggaran pertahanan Indonesia juga masih menghadapi hambatan struktural dimana anggaran dialokasikan untuk kepentingan belanja rutin dan belanja modal atau anggaran

pembangunan. Anggaran rutin merupakan sektor alokasi yang relatif kurang fleksibel, sedangkan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi.

Akan tetapi terdapat peluang untuk tetap dapat mempertahankan anggaran pemeliharaan dan pembangunan, yaitu dengan merancang suatu postur pertahanan sedemikian rupa sehingga anggaran rutin tidak terlalu besar karena peningkatannya bersifat tetap. Jika selalu mempertahankan postur anggaran secara konservatif, maka akan mengurangi peluang pengembangan dan pemeliharaan kapasitas pertahanan negara. Untuk itu diperlukan komitmen nasional untuk mengalokasikan sejumlah tertentu sumber daya nasional untuk pertahanan negara, serta perencanaan pertahanan yang obyektif dan rasional baik dari segi besaran maupun alokasinya sehingga militer dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Kusnanto, 2003).

Penentuan alokasi anggaran pertahanan sebaiknya ditentukan oleh beberapa variabel yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Kondisi ekonomi nasional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah dan prioritas pembangunan. Peningkatan anggaran pertahanan haruslah tidak menyebabkan efisiensi anggaran terganggu sehingga menyebabkan pembengkakan defisit pembiayaan.
- b. Rasio kebutuhan pertahanan dengan memperhatikan postur kekuatan militer yang ideal, yang dilihat dari kenyataan geografis (luas wilayah), kenyataan demografi (besar jumlah penduduk), kebutuhan ruang untuk hidup (keinginan untuk sejajar secara politis dengan negara lain), dan perlunya kekuatan penangkal, pertimbangan untuk pembangunan kekuatan militer Indonesia dari waktu ke waktu. Pemenuhan anggaran pertahanan pada rasio yang proporsional akan membangun kemampuan pertahanan yang berdaya tangkal sekaligus memberikan efek stabilitas yang mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan kesejahteraan (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008).
- c. Besarnya dan tingkat risiko ancaman yang akan dihadapi. Risiko ancaman tersebut diantaranya adalah risiko konflik yang berdimensi keutuhan wilayah NKRI, menjaga perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia serta membantu pemerintah dalam penanganan dampak bencana alam di sejumlah daerah. Dalam era global fungsi pertahanan negara juga berhadapan dengan penanganan ancaman terorisme, ancaman keamanan lintas negara, terutama kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang menguras kekayaan alam, seperti perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, dan gangguan keamanan maritim lainnya (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008).
- d. Kekuatan pokok minimal (*minimum essential forces*), yaitu tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategi pertahanan yang mendesak. Untuk mencapai ini perlu dilakukan berbagai langkah yaitu pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan alutsista (alat utama sistem persenjataan), serta memenuhi kekurangan personel secara kuantitas dan kualitas. (Chrisnandi, Yuddy, 2007)
- e. Peningkatan keterlibatan Indonesia dalam tugas-tugas perdamaian di kawasan dan di dunia. Sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia, misi perdamaian dunia dan pelibatan di kawasan menuntut kesiapan yang prima dari sektor pertahanan negara sangat menonjol (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2008).

5. Tantangan Terhadap Postur Pertahanan

Semakin disadari kini bahwa sangat penting kesiapsiagaan pertahanan suatu negara, baik personel maupun alutsista (alat utama sistem persenjataan) serta dukungan anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan operasi. Pengembangan sistem pertahanan Indonesia saat ini masih diprioritaskan pada pengembangan komponen pendukung, yang ditempuh terutama dengan “pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI sukarela atau wajib, serta pengabdian sesuai bidang profesi” dan “pengembangan industri pertahanan dalam negeri”.

Dengan minimnya anggaran, pemerintah tidak memiliki kemampuan membangun persenjataan (*arms build-up*) yang termodern. Pemerintah hanya dapat melakukan pemeliharaan alutsista. Proses *arms maintenance* ini meliputi perpanjangan usia pakai alutsista, pengadaan alutsista baru atau rehabilitasi

alutsista yang ditujukan hanya untuk kepentingan materiil operasi, serta pengadaan sarana komunikasi untuk meningkatkan komando pengendalian di Markas Besar dan satuan-satuan tempur TNI.

Akan tetapi pembentukan kekuatan pokok minimal (*minimum essential forces*) tetap harus diperhatikan. Perlu diadakan pengadaan alutsista baru, yang pengadaannya banyak dilakukan dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri, yang juga senantiasa diupayakan melalui peningkatan proporsi keterlibatan pemasok lokal dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional. Alutsista yang secara ekonomis dapat dipertahankan, dilakukan upaya *repowering*, *reprofit*, dan *refurbishment* (dirawat kembali). Sementara itu, alutsista yang sudah tua dan membutuhkan biaya tinggi dalam perawatan diupayakan untuk dihapuskan (Chrisnandi, Yuddy, 2007).

Untuk kekurangan personel haruslah secara kuantitas dipenuhi dengan melengkapi sesuai kebutuhannya. Kondisi personel TNI juga harus dibangun baik kualitas maupun kuantitasnya karena tuntutan tugas ke depan semakin berat dan kompleks. Aspek kesejahteraan personil dan keluarga setiap prajurit tetap harus mendapat prioritas. Kualitas personil militer Indonesia, mutu serta kemampuannya harus ditingkatkan dalam upaya peningkatan profesionalitas prajurit dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan. Kemampuan sumber daya manusia juga harus diarahkan pada penggunaan alat-alat teknologi canggih baik *hardware* maupun *software*-nya.

Belum tercapainya postur pertahanan pada tingkat kekuatan pokok minimal akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertahanan negara. Kondisi tersebut membawa risiko bagi upaya pertahanan negara yang sampai saat ini masih sering menghadapi berbagai tantangan, terutama pelanggaran wilayah perbatasan darat, penerbangan gelap pesawat militer atau non militer asing, atau upaya-upaya penguasaan pulau-pulau kecil terluar oleh negara lain.

Menurunnya efek penggentar sistem pertahanan negara merupakan akibat teknologi alutsista yang kurang modern dengan usia teknis yang sudah tua. Efektifitas sistem pertahanan negara banyak dipengaruhi oleh daya penggentar (*deterrent effect*) sebagai salah satu keunggulan yang dapat ditunjukkan oleh kekuatan alutsista berteknologi modern dengan jumlah yang memadai. Lambatnya modernisasi alutsista TNI dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia dan Singapura, juga menjadi sebab menurunnya daya penggentar sistem pertahanan Indonesia bagi militer asing.

Kurangnya daya penggentar TNI AD dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas amunisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan lain-lain yang terbatas jumlahnya dengan usia teknis yang relatif tua serta tingkat kesiapan yang rendah. Kurangnya daya penggentar TNI AL dicerminkan oleh kuantitas dan kualitas Kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir yang jumlahnya terbatas dan usia pakai relatif tua dengan kesiapannya rendah. Sementara kurangnya TNI AU dicerminkan kuantitas dan kualitas pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, dengan kesiapan terbang dan tempur rendah serta kondisi jumlah pesawat sudah melebihi usia pakai yang jumlahnya cukup signifikan.

6. Tantangan Industri Pertahanan

Untuk menjaga keutuhan dan keamanan NKRI yang semakin lama semakin kompleks dibutuhkan dukungan alutsista berteknologi tinggi serta dapat dioperasi secara cepat dan tepat. Kebutuhan ini belum diimbangi upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan kewanitaan. Selama ini industri strategis domestik Indonesia hanya mampu memberikan kontribusi sebesar lima persen dari seluruh jenis alat persenjataan yang dimiliki militer Indonesia (Muhaimin, 2008).

Kendala dalam membangun sebuah industri pertahanan nasional tidak semata-mata berkaitan dengan teknis, namun juga berkaitan dengan kebijakan dan strategi industri pertahanan¹. Ketidaksiuaian di antara kebutuhan alutsista, kemampuan teknis dan finansial industri nasional merupakan salah satu sebab keteringgalan dan ketergantungan peralatan pertahanan dan keamanan terhadap negara lain. (Adi, 2007)

¹ Industri pertahanan adalah industri yang mempunyai kemampuan memproduksi alutsista atau memiliki keterkaitan lain untuk memproduksi alutsista.

Untuk melepas ketergantungan alutsista dari pihak negara produsen, dan juga dalam rangka mempersiapkan perang modern di masa datang, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk segera mewujudkan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah Indonesia harus berusaha keras memberdayakan industri pertahanan dalam negeri guna melepas ketergantungan persenjataan dari negara lain. Salah satunya adalah mengembangkan kembali industri persenjataan dalam negeri yang selama ini sebenarnya sudah berjalan baik (Kirbiantoro & Rudianto, 2010).

Di era globalisasi, kemandirian seratus persen tentulah tidak mungkin, Namun adanya industri pertahanan tetap memiliki manfaat yang cukup signifikan. Untuk mendorong kemajuan industri pertahanan di masa depan, selain industri yang dikelola pemerintah, harus mulai dibuka untuk menggandeng perusahaan-perusahaan swasta. Dan kebijakan pengadaan peralatan militer dari luar negeri hanya untuk barang-barang yang belum diproduksi di dalam negeri.

Walaupun industri pertahanan menurun kondisinya, khususnya semenjak krisis ekonomi 1998, tetapi Indonesia telah memiliki dasar-dasar industri strategis yang dapat dikembangkan menjadi industri pertahanan yang maju. Secara embrional dan potensial, untuk merealisasikan pembangunan industri pertahanan tersebut telah dimulai, seperti yang telah dirintis oleh PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan beberapa industri terkait pendukung lainnya. Namun dukungan politik terhadap pengembangan kemampuan industri strategis tersebut masih harus diperkuat karena dibutuhkan biaya yang besar (Purwanto, 2011).

Untuk mengembangkan teknologi semua peralatan pertahanan, diperlukan juga peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi pertahanan oleh industri pertahanan. Untuk itu semua membutuhkan proses dan waktu cukup panjang yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu perlu disiasati juga bagaimana keluar dari jebakan minimnya anggaran negara, sehingga yang perlu dicari berbagai alternatif pembiayaan. Diantaranya adalah dari alokasi belanja modal bagi sektor pertahanan dalam APBN, dari obligasi khusus yang dijamin pemerintah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan serta melalui pinjaman khusus dari konsorsium ban-bank nasional.

7. Kebijakan Memperkecil Ancaman Eksternal

Produksi nasional dapat berjalan dengan lancar dan mampu ditingkatkan, dengan adanya rasa aman yang dirasakan oleh para pelaku ekonomi dalam melaksanakan segala kegiatannya secara optimal. Untuk itu diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya pertahanan nasional yang kuat sehingga akan mendorong investasi masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Terdapat hubungan antara tingkat keamanan dan tingkat investasi dalam suatu negara. Jika negara terancam akan menyebabkan investor merasa tidak aman dan takut datang ke Indonesia, karena tingkat risiko dan ketidakpastian menjadi semakin tinggi, apalagi terhadap investasi-investasi yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang
2. Dalam kenyataannya, Indonesia belum memiliki anggaran yang cukup untuk mendanai peralatan yang memadai dan berteknologi tinggi, karena itu perlu mempertahankan dan memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta dalam menghadapi seluruh ancaman. Hal ini didukung dengan sulitnya dilakukan koordinasi secara sentral dan cepat karena kondisi demografis yang majemuk dan kondisi geografis Indonesia dengan wilayah kepulauan yang luas. Pemberdayaan pertahanan akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan dengan lebih banyak mendorong inisiatif dari masyarakat.
3. Untuk memperkecil *gap* antara kekuatan Indonesia dengan lingkungan strategisnya, pengauditan, penyediaan dan penyempurnaan alat utama sitem persenjataan TNI harus dilakukan dengan konsep-konsep pembangunan pertahanan jangka panjang, kebutuhan akan peralatan baru, alokasi untuk pengadaan persenjataan, penyediaan biaya untuk pemeliharaan dan pembaruan bagi persenjataan, dan lain-lain. Kondisi persenjataan militer negara-negara tetangga harus menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting, mengingat seringnya terjadi gangguan keamanan di wilayah perbatasan.
4. Untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi, cara berpikir dan kecerdasan kalangan militer terhadap teknologi harus terus menerus dilakukan, khususnya untuk teknologi komunikasi, termasuk komputer, internet, dan pengindraan jauh. Peningkatan kemampuan ini sangat berpengaruh terhadap taktik, operasi, dan strategi, serta cocok dengan medan Indonesia yang

berbentuk kepulauan dengan wilayah perairan yang sangat luas. Dengan kemampuan ini pasukan TNI akan lincah dan dapat tersebar di banyak tempat. Pentingnya penguasaan teknologi ini diperkuat dengan fakta bahwa pengenalan dan penguasaan teknologi oleh negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara sudah lebih maju.

5. Untuk meningkatkan kekuatan pertahanan nasional, program penelitian dan pengembangan pertahanan perlu ditingkatkan dalam menganalisa postur pertahanan yang terbaik dan ancaman potensial yang mungkin muncul beberapa masa ke depan. Kurangnya anggaran dalam penelitian dan pengembangan pertahanan perlu segera diantisipasi melalui perhatian yang lebih besar dan visioner sebagai bagian dari pembinaan pertahanan Indonesia secara jangka panjang.
6. Untuk membantu peningkatan pertahanan nasional, perlu diberdayakan berbagai kelompok sipil untuk berperan dalam bidang pertahanan, misalnya kalangan dunia usaha dan perguruan tinggi. Hal ini akan meringankan beban pemerintah dan memperkuat upaya pemantapan postur pertahanan Indonesia dalam jangka panjang. Kontribusi dunia usaha yang paling relevan adalah dengan kegiatan inovatif melalui penelitian dan pengembangan, serta produksi yang dikaitkan dengan program pengembangan industri pertahanan. Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia dengan keahlian dan kemampuan untuk melakukan penelitian secara terus menerus, berkesinambungan untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, termasuk dalam bidang pengembangan pertahanan nasional.
7. Sudah saatnya dilakukan program-program peningkatan kesejahteraan wilayah perbatasan dengan pemberdayaan masyarakat di sana, serta pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya yang menghubungkan ke wilayah perbatasan, pelabuhan laut dan bandar udara. Dengan meningkatnya aktivitas di perbatasan akan meningkatkan kontrol masyarakat terhadap gangguan-gangguan keamanan dan penyerobotan wilayah perbatasan.
8. Untuk mengatasi ancaman dan gangguan-gangguan di perbatasan, dalam jangka panjang perlu dibangun pangkalan-pangkalan militer besar yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga di wilayah terluar Negara Indonesia. Perlu dipusatkan lima pangkalan militer di pulau-pulau terbesar Indonesia agar cepat tanggap terhadap gangguan yang mengancam, yaitu di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Irian Jaya.
9. Pemerintah perlu bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga perdamaian dan menurunkan ketegangan di lingkungan strategisnya. Peningkatan kerjasama dalam lembaga internasional juga dapat mendukung stabilitas kawasan sehingga hubungan ekonomi antar negara dapat berjalan tanpa hambatan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pada masing-masing negara. Upaya ini juga membantu penghematan penggunaan anggaran pertahanan yang terbatas.

8. Kebijakan Anggaran Pertahanan

Terdapat hubungan antara anggaran pertahanan dengan perekonomian. Berdasarkan hal tersebut diberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meningkatkan perekonomian nasional dengan mendorong peningkatan produksi nasional, karena terdapat hubungan antara perekonomian dan anggaran pertahanan, maka. Perekonomian nasional yang semakin berkembang dan maju akan meningkatkan kemampuan membayar pajak bagi setiap warga negara sebagai kewajibannya. Dengan demikian diharapkan akan tersedia anggaran pertahanan yang memadai seiring dengan meningkatnya Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara terhadap PDB.
2. Perlunya membuat rencana pembangunan kekuatan pertahanan melalui anggaran yang memadai sehingga dapat menciptakan kemampuan pertahanan yang dapat diandalkan. Program-program anggaran harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin agar dana yang disediakan untuk pertahanan negara yang umumnya terbatas dapat memperoleh manfaat maksimal. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya kegiatan ekonomi secara lancar dengan persaingan yang sehat baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Adanya keterbatasan anggaran pemerintah, harus disikapi dengan penyusunan secara seimbang antara keperluan anggaran pertahanan dengan kemampuan penyediaan anggaran lain dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan demikian pengelolaan anggaran pertahanan

haruslah berdasarkan skala prioritas, adanya kesinambungan alokasi antar periode anggaran, efektifitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggunaan anggaran.

4. Untuk meningkatkan pemanfaatan anggaran pertahanan lebih efektif dan efisien, pemerintah harus bekerja keras menghilangkan hambatan dari diri sendiri, misalnya dengan meniadakan distorsi dan pemborosan dalam penggunaan keuangan negara, seperti dalam pembelian alutsista.
5. Secara realistis hambatan dukungan pendanaan keuangan negara untuk pertahanan adalah karena kendala kurangnya anggaran pertahanan. Oleh karena itu harus segera dilakukan terobosan kebijakan untuk keluar dari jebakan anggaran ini. Sumber pembiayaan alternatif juga harus dicari, misalnya melalui kontribusi pemerintah daerah yang surplus, pinjaman lunak dan pembelian alutsista dalam negeri.

9. Kebijakan di Bidang Industri Pertahanan

Industri pertahanan merupakan salah satu bentuk yang dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian secara langsung dari sektor militer. Karena itu perlu diberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkannya :

1. Bangsa Indonesia harus benar-benar meningkatkan industri pertahanan dalam negeri untuk menuju ke arah kemandirian dalam pengadaan alutsista sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada negara lain, dan. Dapat dilakukan seperti selama ini, yaitu dengan membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang produksi utamanya adalah senjata dan peralatan militer, seperti PT Pindad, PT DI, dan PT PAL. Pendekatan lain adalah dengan menitipkan produksi senjata atau peralatan militer kepada perusahaan BUMN dan swasta yang sudah berkembang maju.
2. Industri pertahanan perlu dikembangkan secara serius, berkelanjutan dan berkesinambungan agar terlihat pengaruhnya terhadap perekonomian. Kemajuan industri pertahanan harus ditopang dengan niat yang serius dari pemerintah dan perusahaan untuk menjalankan bisnis ini sebaik-baiknya. Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh hasil produksi militer dibeli angkatan bersenjata dengan adanya kepastian anggaran. Pemerintah dan TNI membantu dan harus mengawasi perusahaan untuk selalu menjaga kualitas produksi dan menepati jadwal penyelesaian pesanan militer sesuai dengan kebutuhan. Akan lebih baik jika kegiatan industri pertahanan ini diatur dan dilindungi dengan Undang-Undang untuk mendapatkan kepastian hukum.
3. Perusahaan juga dapat menjaga kelangsungan operasional perusahaannya dengan mengadakan produksi non militer. Produksi non militer diusahakan dapat menciptakan keseimbangan dengan menutup kekurangan penerimaan dari produksi peralatan militer. Selain berfungsi mencari keuntungan, industri pertahanan juga dikonsentrasikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi modern.
4. Karena industri pertahanan merupakan padat modal dan sangat besar, perlu dilakukan pencarian dana-dana alternatif, seperti penerbitan obligasi ataupun penjualan saham secara publik. Tentunya proporsi saham pemerintah Indonesia adalah yang terbesar melalui koordinasi dengan departemen-departemen terkait, seperti departemen keuangan, departemen BUMN dan departemen pertahanan. Dengan demikian pengawasan publik bersama-sama pemerintah terhadap industri pertahanan akan lebih transparan.

10. Kebijakan Terhadap Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia

Profesionalisme dari personil tentara untuk menjaga keamanan perlu ditingkatkan, sehingga para pelaku ekonomi percaya dan yakin dapat menjalankan dan meningkatkan kegiatan ekonominya secara aman. Dengan demikian kekuatan perekonomian tidak dapat dilepaskan dari dukungan profesionalisme dari TNI. Berdasarkan hal tersebut diberikan beberapa rekomendasi :

1. Pada tataran personil perlu adanya reorientasi yang pasti di kalangan TNI tentang peranannya di dalam negara, reposisi, reaktualisasi dan redefinisi mengenai peranan TNI di dalam negeri menuju prinsip-prinsip profesionalisme. Pada era reformasi ini harus dihilangkan kegamangan bagi personil TNI karena tidak lagi memegang peranan aktif secara institusional maupun personal di bidang sosial, politik, dan ekonomi.

2. Pemeliharaan struktur militer perlu dilakukan secara profesional dan berkesinambungan. Struktur militer secara natural sangat stabil dalam hirarki sehingga mampu mengawal perubahan-perubahan struktur ekonomi dan sosial masyarakat, serta mampu menghadapi konflik-konflik keamanan, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.
3. Untuk meningkatkan kekuatan pertahanan perlu digabungkan seluruh kekuatan militer secara sinergis sehingga mampu menjalankan kewajibannya dalam melindungi keselamatan dan ketentraman setiap warga negara, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, dan menangkal serta menghadapi setiap potensi ancaman yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan pembinaan yang relatif merata dengan proporsi yang tepat kepada seluruh kekuatan angkatan bersenjata, baik kekuatan laut, udara, maupun darat.
4. Pada tataran kelembagaan, perlu ditetapkan kebijakan nasional yang tegas untuk menjadikan TNI sebagai satu-satunya lembaga pengelola pertahanan nasional yang profesional dengan pola pikir bahwa fungsi tunggal dan fungsi pokok TNI adalah sebagai alat pertahanan negara. Implikasi dari kebijakan ini adalah secara struktural TNI tidak lagi memiliki perwakilan di lembaga perwakilan dan lembaga pemerintahan, serta tidak lagi aktif di bidang sosial ekonomi. Namun TNI akan lebih fokus dalam menghadapi segala ancaman dari pihak-pihak atau negara lain yang mengganggu kedaulatan Indonesia.
5. Agar adanya kepastian hukum, pada tataran struktural perlu dilengkapi perangkat perundang-undangan yang tepat sebagai “payung hukum” bagi legalitas tindakan TNI dalam menjalankan fungsi pertahanannya sebagai bagian dari fungsi keamanan nasional. Payung hukum ini diperlukan untuk menghilangkan keraguan TNI dalam bertindak tegas. Perundang-undangan secara konseptual akan menjadikan TNI sebagai organisasi yang modern dan lebih memantapkan kedudukan militer dalam kehidupan bernegara.
6. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara menjalankan kewajibannya menjaga berlangsungnya proses-proses produksi nasional secara lancar, untuk itu militer tidak perlu ikut serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan bisnis. Sumber dana tidak boleh lagi berasal dari kegiatan bisnis militer, karena menurut pengalaman selama ini manfaatnya masih lebih kecil dibanding kerugian yang harus dipikul. Diantaranya adalah profesionalisme dan kualitas prajurit menurun, munculnya kecemburuan antara tentara yang melakukan bisnis dengan yang tidak, dan gangguan pada tugas yang harus diemban.

11. Kesimpulan

Pertahanan dan perekonomian merupakan dua variabel yang saling timbal balik. Tanpa pertahanan maka akan muncul ancaman atau gangguan-gangguan sehingga perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya anggaran pertahanan hanya dapat ditingkatkan jika pendapatan nasional juga meningkat.

Tantangan ke depan bagi pertahanan Indonesia adalah kurangnya anggaran pertahanan sedangkan permasalahan pertahanan akan semakin kompleks. Sumber daya alam yang sangat terbatas menyebabkan konflik ke depan akan sangat dipengaruhi oleh motivasi pengendalian sumber-sumber daya tersebut melalui kekuatan militer. Untuk menghadapinya maka peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista harus diperhatikan dengan mengikuti teknologi masa kini. Pengembangan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas juga harus terus menerus dilakukan, seperti dengan pelatihan-pelatihan, pendidikan, dan penyerapan teknologi-teknologi pertahanan yang terbaru. Selain itu sudah saatnya industri pertahanan Indonesia mulai diberdayakan dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan pertahanan nasional.

Rekomendasi-rekomendasi kebijakan diberikan untuk memperbaiki pertahanan nasional sehingga mampu menjalankan fungsinya secara optimal menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman-ancaman dari pihak-pihak atau negara lain.

REFERENSI

- Adi; Hasan; Suryanto; Darmawan. (2007). *Kebutuhan Dana Pengembangan Pertahanan Nasional*. Jakarta : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bakrie, Connie Rahakundini. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Chrisnandi, Yuddy. (2007). "The Political Dilemma of Defence Budgeting in Indonesia," *UNISCI Discussion Papers*, No.15.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, ISBN 978-979-8878-04-6, Dephan, Jakarta
- Institute for Defense Security and Peace Study (IDSPS). (2008). "Kebijakan Umum Kemanan Nasional", *Policy Paper*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2011). *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*, Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson Kennedy. (2016). Motivasi Negara dalam Menentukan Anggaran Pertahanan, *Fundamental Management Journal*, ISSN: 2540-9816 (print) 2540-9220 (online) Volume:1 No.2, Oktober 2016.
- Kirbiantoro & Rudianto, Dody. (2010). *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia, Potensi, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta : Golden Terayon Press.
- Kusnanto, Anggoro. (2003). "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum". *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 14 Juli 2003
- Kusnanto, Anggoro. (2003). Birokrasi Militer dan Akuntabilitas Anggaran Pertahanan, Bahan diskusi dalam Focus Group Discussion Propatria, Hotel Santika, Jakarta.
- Muhaimin, Yahya A. (2008). *Bambu Runcing dan Mesiu Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Kencana.
- Purwanto, Wawan H. (2011). *TNI dan Dunia Baru Sistem Pertahanan*. Jakarta : CMB Press.
- Steiner, George A. et all (2003). "How to Forcast Military Expenditure", *California Management Review*.
- Undang-undang TNI pasal 25 UU no.3/2002